



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

TAHUN 2025



JL. A.YANI NO.1 GEDUNG D LT 7, BEKASI SELATAN,
KOTA BEKASI, JAWA BARAT, INDONESIA.



<https://disparbud.bekasikota.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dan pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui LKIP ini diharapkan dapat dilakukan evaluasi kinerja secara objektif guna mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kinerja organisasi, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Bekasi, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Bekasi



Dzikron, S.T., M.T.
NIP. 197308022002121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi	Error! Bookmark not defined.2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	2
1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	3
1.5 Standar Operasional Prosedur	15
1.6 Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Perencanaan Kinerja.....	17
2.2 Tujuan Dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	17
2.3 Indikator Kinerja Utama	18
2.4 Ringkasan Perjanjian Kinerja.....	19
2.5 Keterkaitan Perencanaan Kinerja RPD dengan RPJMD 2024-2029	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Analisis Capaian Kinerja	22
3.3 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber daya.....	33
3.4 Analisis Efisiensi Anggaran	33
3.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja.....	34
3.6 Realisasi Anggaran	40
BAB IV.....	43
PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Rencana Tindak Lanjut	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	15
Gambar 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi periode 2024-2029	18
Gambar 3. 1 Meningkatnya pelestarian warisan budaya	22
Gambar 3. 2 Meningkatnya daya saing sektor pariwisata PAD Sektor Pariwisata	26
Gambar 3. 3 Pembinaan dan Pengawasan pelaku usaha jasa kepariwisataan	27
Gambar 3. 4 Kunjungan Wisata	28
Gambar 3. 5 Sarana dan Prasarana Kawasan objek wisata folder air Ciketing Udik	29
Gambar 3. 6 Sasaran 3 Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif	31
Gambar 3. 7 Pembinaan Pelaku sektor Ekonomi Kreatif	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 1. 2 Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan.....	4
Tabel 1. 3 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1. 4 Data Kebutuhan Personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Analisa Jabatan.....	5
Tabel 1. 5 Data Inventaris Kantor.....	9
Tabel 1. 6 Data Aset Bangunan.....	13
Tabel 1. 7 Data Aset Kendaraan Dinas.....	14

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra.....	18
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja yang Mengacu pada RPD Kota Bekasi.....	19
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja yang Mengacu pada RPJMD Kota Bekasi.....	19
Tabel 2. 4 Matriks Keterkaitan Sasaran Strategis RPD dengan Indikator dan Target RPJMD.....	20

Tabel 3. 1 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.....	21
Tabel 3. 2 Warisan Budaya yang dilestarikan.....	23
Tabel 3. 3 Cagar atau Warisan Budaya yang sudah ditetapkan.....	24
Tabel 3. 4 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025.....	35
Tabel 3. 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	37
Tabel 3. 6 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.....	39
Tabel 3. 7 Program Pemasaran Kepariwisataaan.....	39
Tabel 3. 8 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.....	40
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap instansi pemerintah wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKIP ini juga menjadi sarana komunikasi kinerja kepada Wali Kota, DPRD, dan masyarakat. Selain itu, LKIP berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pada tahun berikutnya, khususnya dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif di Kota Bekasi. Penyusunan LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan ketercapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Adapun gambaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2026 sebagaimana Perwal Nomor 9 Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2025
1.	Berkembangnya Pariwisata Kota, Ekonomi Kreatif dan digital	Proposi PD RB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			4,38%
			1. Meningkatnya Pelestarian warisan budaya	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	8,33%
			2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	642.306.825.000
				Kunjungan Wisata	1.263.288
			3. Meningkatnya ekosistem ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan usaha Sektor Ekonomi	5%

1.2 Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan pariwisata dan kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pariwisata, pemasaran pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif;
- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang berlokasi di kantor Pemerintah Kota Bekasi Gedung D Jl. Ahmad Yani No. 01 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada urusan kepariwisataan dan kebudayaan. Sebagai salah satu komponen pendukung pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Bekasi yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Kota yaitu Presentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa, maka kontribusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mewujudkan ketercapaian target kinerja Pemerintah tidak dapat dipungkiri keberadaanya.

Pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Bekasi menghadapi berbagai tantangan, sebagai Kota Metropolitan dengan minimnya sumber daya alam, banyaknya permukiman serta pesatnya perdagangan komersial Kota Bekasi merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter sebagai destinasi wisata perkotaan yang ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata kota (urban tourism) seperti wisata rekreasi, wisata keluarga, wisata belanja, wisata sejarah ataupun wisata pendidikan dan budaya.

Namun disisi lain, perkembangan kepariwisataan dengan karakteristik tersebut juga menghadapi berbagai kendala dan permasalahan antara lain:

1. Bidang Kebudayaan

Permasalahan yang seringkali dihadapi dalam upaya pengembangan sektor budaya di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pemeliharaan dan perawatan cagar budaya yang dapat dikembangkan menjadi wisata sejarah;
- Belum maksimalnya pemanfaatan gedung kesenian sebagai tempat pertunjukan atau tempat berkarya dan berekspresi bagi para pelaku seni;
- Belum adanya museum sejarah perjuangan Kota Bekasi.
- Minimnya pembinaan terhadap sanggar seni tradisional di Kota Bekasi
- Masih minimnya even seni yang diselenggarakan baik di hotel maupun evenlainnya Minimnya promosi kesenian Kota Bekasi ke luar daerah baik dalam maupun luar negeri
- Banyaknya sanggara yang alat keseniannya sudah rusak Belum optimalnya pemanfaatan gedung kesenian

Tahun 2025

2. Bidang Kepariwisata

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Belum optimalnya Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kepariwisataan
- Masih terbatasnya peningkatan kompetensi SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Belum adanya wisata alam/buatan yang representatif
- Belum adanya wisata alam/buatan

3. Bidang Pemasaran

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Kurangnya sarana dan prasarana promosi seni budaya dan pariwisata Objek wisata budaya kondisinya belum siap kunjung
- Belum adanya museum sejarah perjuangan Kota Bekasi

4. Bidang Ekonomi Kreatif

- Masih terbatasnya kemampuan fasilitasi pendampingan oleh instansi terhadap pelaku ekonomi kreatif
- Masih terbatasnya kemampuan fasilitasi pengembangan terhadap kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
- Masih rendahnya partisipasi kelembagaan dalam pengembangan ekonomi kreatif
- Kegiatan evaluasi program yang kurang efektif

1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 7 Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Program Pemasaran Pariwisata

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum layanan urusan pariwisata dan urusan kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi terbagi dalam :

1. Sekretariat
2. Bidang Kepariwisataan
3. Bidang Pemasaran Kepariwisataan
4. Bidang Ekonomi Kreatif
5. Bidang Kebudayaan

Selain pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran, pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi meliputi Pemberian Rekomendasi Insidentil, Rekomendasi Penggunaan Gedung Kesenian dan Rekomendasi Gedung Creative Center. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta penyelenggaraan layanan dibutuhkan dukungan sumber daya antara lain sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi serta dukungan sarana dan prasarana operasional kantor sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 berjumlah 53 Orang terdiri dari 23 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Untuk mengoptimalkan pegawai secara kontinyu diberikan pembinaan dan pembagian tugas habis pekerjaan pada seluruh jajaran organisasi dan berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kepariwisataan dan Kebudayaan dapat berjalan merujuk pada pencapaian Renstra.

Adapun rincian dari sumber daya yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

Tabel 1. 2 Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan

No.	Bagian/Bidang	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	-	3	5	1	9
2.	Pariwisata	-	2	3	0	5
3.	Kebudayaan	-	-	1	2	3
4.	Pemasaran	-	0	1	1	2
5.	Ekonomi Kreatif	-	1	1	2	4
J U M L A H		-	6	13	7	23

Tabel 1. 3 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bagian/ Bidang	PNS						P3K				Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	0	0	3	1	4	1	4	4	4	0	
2	Kepariwisata	0	0	2	0	3	0	0	1	2	0	
3	Kebudayaan	0	0	0	0	2	1	0	0	4	0	
4	Pemasaran Kepariwisata	0	0	0	0	1	1	4	1	2	0	
5	Ekonomi Kreatif	0	0	2	0	1	1	0	0	4	0	
JUMLAH		0	0	7	1	11	4	8	6	16	0	

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Untuk mengoptimalkan peran serta kompetensi pegawai dalam pencapaian kinerja pelayanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah memetakan kebutuhan personil teknis bidang pariwisata dan kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Data Kebutuhan Personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Analisa Jabatan

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
1	Arsiparis Pertama	S1 di bidang manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata kantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
2	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi / Manajemen / Administrasi / Teknik Informatika / Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas	1

3	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
4	Penyusun Rencana Promosi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Kursus/Diklat	1
5	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/ Desain Komunikasi Visual atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
7	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	SLTA / DI / D-2 (Diploma-Dua) / D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran / Administrasi perkantoran / Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
8	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
9	Pemeriksa Kepariwisata	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
10	Analisis Obyek Wisata	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
11	Penyuluh Wisata	a. S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma Empat) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
12	Analisis Pariwisata	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Pariwisata/Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
13	Pengelola Data	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Informatika/ Manajemen Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4

14	Pengawas Kepariwisata	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Pariwisata /Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
15	Pengelola Data Eksplorasi Cagar Budaya	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen / Administrasi / Pemerintahan / Teknik Infomatika / Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
16	Juru Pelestari Cagar Budaya	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	1
17	Analisis Sumber Sejarah	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sejarah/ Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
17	Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
18	Analisis Ekspresi Budaya Tradisional	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
19	Pengelola Adat dan Kesenian	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
20	Analisis Apresiasi Karya Seni	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Penciptaan Seni atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
21	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan	1
22	Pamong Budaya Ahli Muda	Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu sosial humaniora, agama, filsafat, ilmu seni, desain, dan media bagi Jabatan Fungsional kategori keahlian	2

23	Analisis Mutu Produk	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Perdagangan / Manajemen / Administrasi Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
24	Analisis Sarana Riset	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen / Pemerintahan / Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
25	Pengembangan Sarana dan Prasarana	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil / Planologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Pendidikan dan Pelatihan	1
26	Penelaah Pengembangan Usaha	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen / Pemerintahan / Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
27	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen / Administrasi / Pemerintahan / Teknik Informatika / Manajemen	1
28	Analisis Ekonomi Kreatif	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
29	Pengelola Hak Cipta dan Merek	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi / Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	1
30	Pengelola Hak Kekayaan Intelektual	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi / Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
31	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Sarjana (Diploma-IV) di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, dan perencanaan wilayah dan kota atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	1

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

b. Sarana dan Prasarana

Tabel 1. 5 Data Inventaris Kantor

No	Nama	Banyaknya	Tahun	Keterangan
1	Proyektor	3	2017	Baik
2	Kursi Pejabat Eselon IV	15	2017	Cukup Baik
3	Kursi Pejabat Eselon II	2	2017	Baik
4	Kursi Pejabat Eselon III	7	2017	Cukup Baik
5	Printer Hp Laserjet	6	2017	Baik
6	Note Book	6	2017	Cukup Baik
7	Komputer	13	2017	Cukup Baik
8	Sofa	3	2017	Baik
9	Kursi Biasa	22	2017	Baik
10	Mesin Absensi	1	2017	Baik
11	Alat Penghancur Kertas	1	2017	Baik
12	Lemari Kaca	1	2017	Baik
13	Filing Cabinet	28	2017	Cukup Baik
14	Lemari Besi	8	2017	Baik
15	Rak Penyimpanan	3	2017	Baik
16	Handphone	3	2016	Baik
17	Kursi Kerja Non Struktural	9	2016	Cukup Baik
18	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	2016	Cukup Baik
19	Meja Pegawai	42	2016	Cukup Baik
20	Sever	2	2016	Baik
21	Printer	3	2016	Cukup Baik
22	Laptop	4	2016	Cukup Baik
23	Scanner	1	2015	Baik
24	Rak Besi Metal	6	2015	Cukup Baik
25	Lemari Besi	2	2015	Baik
26	Mesin tik elektronik	1	2015	Baik
27	Kunci Khusus Engine	1	2015	Rusak Berat
28	Sound System	1	2014	Kurang Baik
29	Meja Pegawai Non Struktural	2	2014	Rusak Berat
30	Rak arsip	2	2014	Rusak Berat

31	Senar Drum	3	2007	2 Rusak ringan, 1 Rusak Berat
32	Kwarton Standar	1	2009	Rusak Berat
33	Bariton	1	2009	1 Rusak berat
34	Bendera Coulor Guard	1	2009	Rusak Berat
35	Stik Mayorette 150 cm	1	2009	Rusak Berat
36	Pakaian Seragam Marching drum	1	2009	Rusak Berat
37	Frenc Horn	2	2009	Rusak ringan
38	Fluegel Horn	3	2009	2 rusak ringan, 1 Rusak Berat
39	Melophone	1	2009	Rusak Ringan
40	Trumpet	6	2009	5 Rusak ringan, 1 Rusak Berat
41	Quintom	2	2009	Rusak Berat
42	Marching Bells	3	2009	Rusak Berat
43	Tuba	1	2009	Rusak Berat
44	Gitar Bass LA musik	1	2009	Rusak Berat

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel 1. 6 Data Aset Bangunan

No	Nama Bangunan	Tahun Pengadaan	Lokasi	Status Tanah	Penggunaan	Ket
1	Gedung Kesenian	2014	Situ Rawa Gede, Kel Bojong Menteng Kec.Rawalumbu	Milik negara	Sarana penyelenggaraan festival Seni dan Budaya	Gedung baru di serah terimakan dari DISPORBUD PAR ke DISPARBUD
2	Kawasan Wisata Kuliner	tahun 2015	Jl. Terusan Asrama Haji	Milik negara	Kawasan wisata kuliner	Terdapat 30 kios tenda untuk pedagang kuliner
3	Kawasan Wisata Kuliner Danau Duta Harapan	tahun 2017	Perumahan Duta Harapan	Milik negara	Kawasan wisata kuliner	Terdapat 20 kios untuk pedagang kuliner

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Pembangunan Gedung Kesenian H. Djaini yang berupa gedung kesenian yang telah dilaksanakan pembangunannya oleh Dinas perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2022 merupakan implementasi dari Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 yaitu : Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif dengan target 1 gedung indoor.yang pada tahun 2022 telah di serah terima kan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dan menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pengguna. Dengan adanya serah terima maka gedung kesenian menjadi aset tetap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang berarti pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selanjutnya gedung kesenian untuk dapat digunakan diperlukan sarana dan prasarana seperti: alat alat kesenian, sound system, peralatan kantor meja, kursi, komputer, dan lain lain. Untuk pemeliharaan nya dibutuhkan alokasi anggaran untuk petugas kebersihan yang di gaji tiap bulan oleh pemerintah daerah. Dilihat dari luasnya bangunan gedung kesenian diperlukan minimal 2 (dua) orang petugas kebersihan agar kebersihan gedung tetap terjaga dengan baik.

Kawasan Wisata Kuliner berlokasi di Jl. Terusan Asrama Haji didepan Apartemen Center Point Blok D, merupakan kawasan kuliner yang menggunakan tenda bongkar pasang dengan jumlah

30 (tiga puluh) buah. Konsep awal dibuatnya kawasan wisata kuliner adalah untuk menambah destinasi wisata di Kota Bekasi yang menyajikan makanan khas daerah walaupun pada akhirnya berkembang menjadi kawasan wisata kuliner yang menyajikan makanan khas daerah dan kuliner moderen. Kawasan Wisata Kuliner Duta Harapan ditetapkan sebagai kawasan wisata kuliner di Perumahan Duta Harapan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi bertujuan sebagai inisiatif untuk mengembangkan wisata danau Duta Harapan dengan pembangunan kawasan wisata kuliner.

Tabel 1. 7 Data Aset Kendaraan Dinas

No	Merk/Type	No.Pol	Keterangan
1	Toyota Hilux	B 9010 KSL	Kondisi Baik
2	Toyota Kijang Innova	B 1313 KQN	Kondisi Baik
3	Daihatsu Terios	B 1015 KQN	Kondisi Baik
4	Daihatsu Xenia	B 1153 KQN	Kondisi Baik
5	Daihatsu Xenia	B 1155 KQN	Kondisi Baik
6	Daihatsu Terios	B 1009 KQN	Kondisi Baik

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

1.5 Standar Operasional Prosedur

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi memiliki SOP yaitu:

Bidang Kebudayaan:

1. SOP Pemeliharaan Cagar Budaya Kota Bekasi;
2. SOP Gelar Budaya Tingkat Kecamatan Kota Bekasi;
3. SOP Penerbitan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Seni Budaya;
4. SOP Penerbitan Rekomendasi Operasional Sanggar Seni;
5. SOP Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Gedung Kesenian;
6. SOP Pelaksanaan Kegiatan Festival dan Lomba Seni Budaya.

Bidang Pariwisata:

1. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Haji/Umroh;
2. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Hiburan Insidentil.

Bidang Pemasaran:

1. SOP Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pariwisata Seni dan Budaya;
2. SOP Pelaksanaan Promosi Pariwisata Seni dan Budaya;
3. SOP Penyusunan Laporan Rencana Kebutuhan Sarana Promosi Pariwisata Seni dan Budaya.

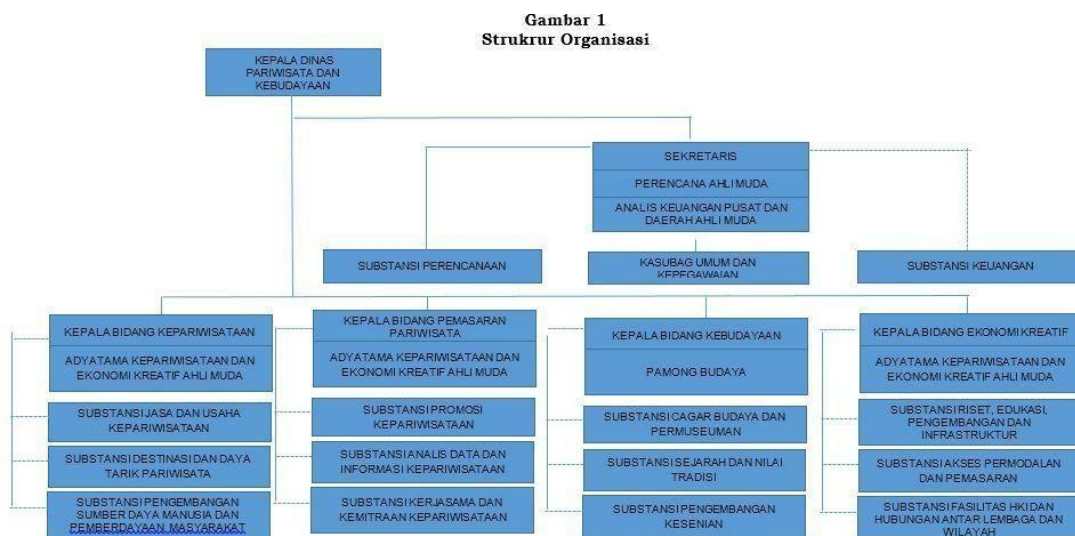
Bidang Ekonomi Kreatif:

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Gedung Bekasi Creative Center.

Struktur Organisasi Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berdasarkan

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun adalah sebagaimana gambar berikut :



1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025f mengacup kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Perjanjian Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian indikator Kinerja utama

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan tercapaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisien sipenggunaan sumberdaya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025–2029, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Dengan demikian, seluruh tujuan, sasaran, indikator, program, dan kegiatan telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Perencanaan kinerja tahun 2025 juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta dinamika kebutuhan pembangunan sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif, sehingga target yang ditetapkan bersifat realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome).

2.2. Tujuan Dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan serta pelestarian warisan budaya, maka tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah : “Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital”. Tujuan ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan pariwisata yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi budaya lokal serta perkembangan teknologi digital.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut serta menjamin keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang keselaran dengan arah kebijakan pembangunan daerah sbasgai mana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka ditetpkan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya
2. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata
3. Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif

Dari hasil penyandingan substansi muatan beberapa acuan dokumen perencanaan tersebut teridentifikasi 1 (satu) tujuan pembangunan Kota Bekasi untuk periode 2024-2029. Tujuan tersebut kemudian diterjemahkan lebih rinci ke dalam 3 (tiga) sasaran. Kerangka umum tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPJMD



Gambar 2. 1 Kaitan antara Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi periode 2024-2029

Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

2.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya melalui pengukuran kinerja yang lebih terstruktur melalui pembentukan indikator kinerja utama (IKU). Target pembangunan dari masing-masing indikator berdasarkan *casecading* kinerja tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra

No	Tujuan/Sasaran Rancangan RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Kinerja					Kondisi akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Berkembangnya Pariwisata Kota, Ekonomi Kreatif Digital	Proporsi PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum								
1.1	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	n/a	8,33%	19,32 %	23,94 %	31,48 %	45,95 %	100%
1.2	Meningkatnya daya saing sektor Pariwisata	PAD Sektor Partiwisata	Rupiah	518.484.041.877	642.306.825.000	614.195.542.925	653.066.535.285	667.572.475.741	706.731.091.312	745.494.546.198
		Kunjungan Wisata	Orang	2.490.665	1.263.288	1.320.976	1.478.664	1.636.352	1.794.040	1.951.728
1.3	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Usaha Sektor Ekonomi Kreatif	%	n/a	5%	5%	5%	5%	5%	5%

2.4 Ringkasan Perjanjian Kinerja

Sasaran strategis yang dirumuskan dalam perencanaan kinerja mengacu pada isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPD, khususnya pada sektor pariwisata, seni dan budaya, serta tata kelola pemerintahan. Ringkasan perjanjian kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja yang Mengacu pada RPD Kota Bekasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	meningkatkan pengembangan potensi pariwisata	Persentase kawasan wisata yang dikembangkan	4,76%
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	10%
		Rata-rata lama menginap wisatawan	2 malam
2	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni budaya	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	9 Situs
		Persentase sanggar budaya yang dikembangkan	5 Lembaga
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	78 (BB)

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja yang Mengacu pada RPJMD Kota Bekasi

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	%	8,33
2	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	Rp	642.306.825.000
		Kunjungan Wisata	Orang	1.263.288
3	Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif	Persentase peningkatan Usaha Sektor Ekonomi	%	5

2.5 Keterkaitan Perencanaan Kinerja RPD dengan RPJMD 2024–2029

Perencanaan kinerja yang dirumuskan dalam RPD tersebut memiliki keterkaitan langsung dan berkesinambungan dengan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024–2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah serta memastikan bahwa target kinerja tahunan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran jangka menengah daerah.

Pada Tahun 2024, penetapan indikator kinerja sasaran masih mengacu pada dokumen **Rencana Pembangunan Daerah (RPD)** sebagai dokumen perencanaan transisi, sehingga indikator yang digunakan bersifat sektoral dan lebih menekankan pada capaian output. Indikator yang digunakan antara lain Nilai

AKIP, persentase kawasan wisata yang dikembangkan, persentase peningkatan kunjungan wisatawan, rata-rata lama menginap, persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, serta persentase sanggar budaya yang dikembangkan. Indikator-indikator tersebut dipilih untuk memastikan keberlangsungan pengukuran kinerja di tengah proses penyesuaian kebijakan perencanaan daerah.

Seiring dengan ditetapkannya **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**, mulai Tahun 2025 dilakukan **penyempurnaan indikator kinerja utama** agar lebih selaras dengan arah pembangunan jangka menengah dan kebijakan nasional. Penyempurnaan tersebut ditandai dengan pergeseran indikator dari pendekatan output menuju **outcome**, antara lain melalui penggunaan indikator PAD sektor pariwisata dan kunjungan wisata sebagai ukuran dampak pengembangan pariwisata, serta penetapan indikator persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan yang mengintegrasikan aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya secara lebih komprehensif.

Perubahan indikator kinerja dari RPD ke RPJMD dilakukan sebagai bentuk **efisiensi dan peningkatan kualitas pengukuran kinerja**, melalui penyederhanaan indikator, penggabungan indikator sejenis, serta perluasan cakupan pengukuran tanpa mengurangi substansi program dan kegiatan. Dengan demikian, perubahan indikator tersebut tidak mencerminkan perubahan arah kebijakan, melainkan merupakan upaya untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih akurat, terintegrasi, dan mampu menggambarkan dampak nyata pembangunan kepada masyarakat.

Tabel 2. 4 Matriks Keterkaitan Sasaran Strategis RPD dengan Indikator dan Target RPJMD

No	Sasaran Strategis RPD	Sasaran Strategis RPJMD 2024-2029	Indikator RPJMD	TARGET
1	Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	Rp.64.306.825.000
			Kunjungan wisata	1.263.288 orang
2	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni budaya	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	8,33%
3	Penguatan sektor pariwisata dan budaya	Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif	Persentase peningkatan usaha sektor ekonomi kreatif	5%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan selama satu tahun anggaran. Akuntabilitas ini disajikan secara terukur, transparan, dan sistematis, sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKIP menggambarkan keterkaitan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil kinerja yang dicapai, dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Pariwisata dan budaya Kota Bekasi selama tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun 2025-2029 serta perjanjian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja.

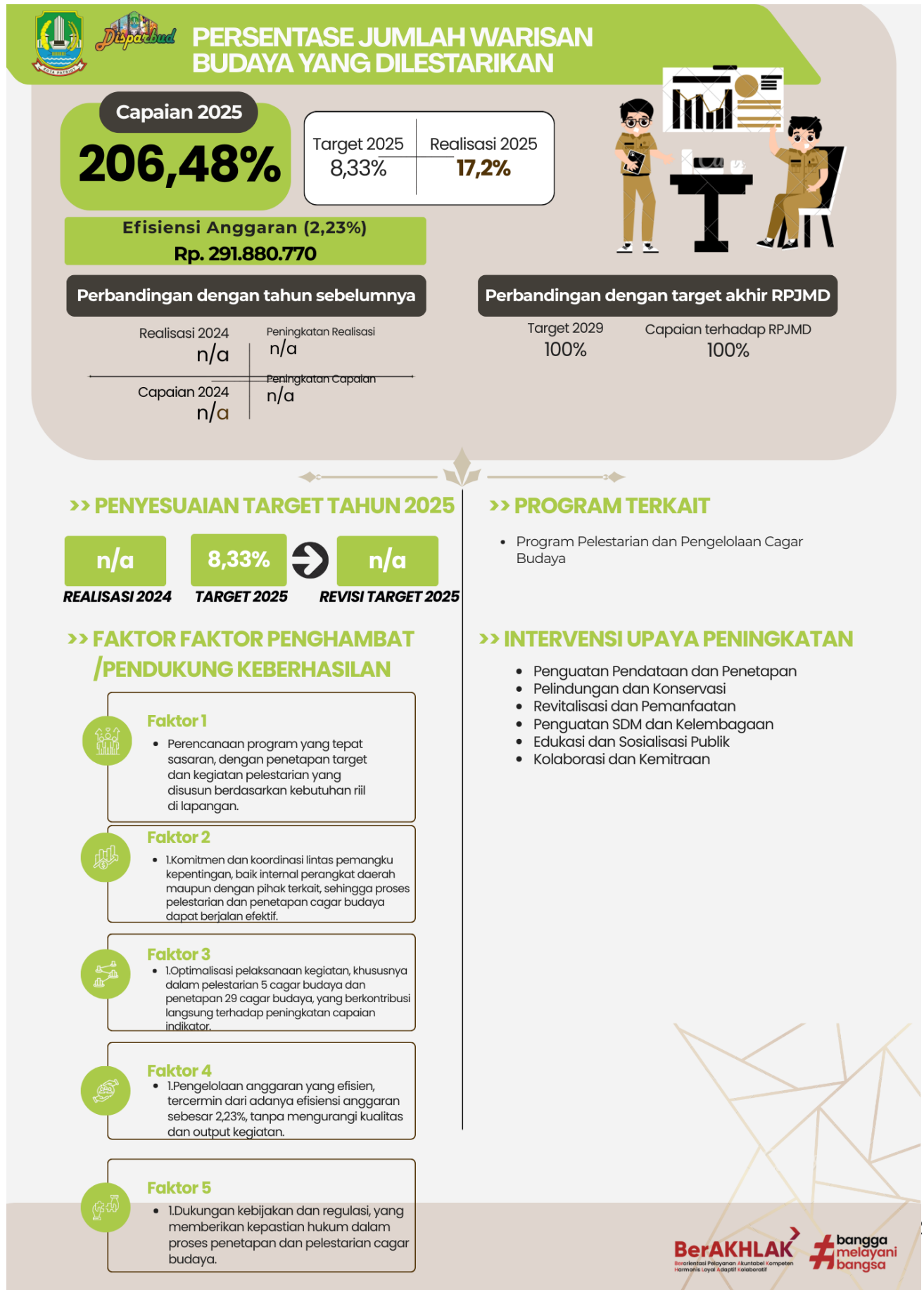
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang makin baik. Perhitungan persentase pencapaian target dalam Penetapan Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

Tabel 3. 1 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	1. Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	8.33%	17,2%	206.48%
1.	Meningkatnya daya saing sektor Pariwisata	i. PAD Sektor Partiwisata	642.306.825.000	530.888.352.995	78,44%
		ii. Kunjungan Wisata	1.263.288	3.276.061	259,32%
3	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Usaha Sektor Ekonomi Kreatif	5	23,59	23,59

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Gambar 3. 1 Meningkatnya pelestarian warisan budaya



Pada tahun 2025, indikator **Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan** mencapai **206,48%**, melampaui target Renstra sebesar **8,33%** dengan realisasi **17,2%**. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena telah memenuhi **100% target akhir Renstra**, menandakan efektivitas pelaksanaan program pelestarian warisan budaya.

Pada Tahun 2024, indikator **Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan** belum ditetapkan sebagai target kinerja, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menyesuaikan kebijakan perencanaan daerah.

Perubahan IKU tersebut mengacu pada **peralihan dokumen perencanaan dari RPD ke RPJMD**, sehingga indikator kinerja pada Tahun 2024 masih menggunakan indikator transisi yang ditetapkan dalam dokumen RPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, **indikator kinerja yang digunakan pada Tahun 2024 adalah**: Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dengan target 9 dan realisasi 9,37 Capaian 104 %

Sementara itu, **indikator Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan** baru ditetapkan dan mulai digunakan pada periode RPJMD selanjutnya, sehingga tidak menjadi target kinerja pada Tahun 2024.

Dengan demikian, **tidak ditetapkannya target indikator dimaksud pada Tahun 2024 bukan merupakan kelalaian pelaksanaan program**, melainkan bagian dari **penyesuaian kebijakan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh **efisiensi anggaran sebesar 2,23%** atau senilai **Rp 291.880.770,-**, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif. Data perbandingan dengan tahun sebelumnya maupun rata-rata nasional belum tersedia, sehingga capaian tahun 2025 menjadi dasar (baseline) penting untuk evaluasi dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Capaian ini dicapai melalui berbagai upaya pelestarian, antara lain dengan melestarikan **5 cagar budaya** dan menetapkan **29 cagar budaya**, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. berikut Daftar Cagar Budaya yang dilestarikan dan di tetapkan di Kota Bekasi Tahun 2025:

Tabel 3. 2 Warisan Budaya yang dilestarikan

NO	WARISAN BUDAYA	ALAMAT	JENIS CAGAR BUDAYA	BENTUK PELESTARIAN	SUMBER PEMBIAYAAN
1	Makam kramat syeh mangkubumi	Jl. Harapan Indah Raya Kp. Utan Apit RT. 05 RW.09 Medan Satria	Makan Kramat	Perbaikan lokasi makam	APBD
2	Tugu Chairil Anwar	Jl. Jend Ahmad Yani , Bekasi Selatan	Tugu	Perbaikan Lokasi Monumen	APBD
3	Tugu bambu runcing	Jl. M.Hasibuan, Bekasi Selatan	Tugu	Perbaikan Lokasi Monumen	APBD
4	Tugu perjuangan Rakyat Bekasi	Jl. Veteran , Bekasi Selatan	Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi	Perbaikan Lokasi Monumen	APBD
5	Tugu Kali Bekasi	Jl. Ir.H.Juanda Margajaya Bekasi Selatan	Tugu Kali Bekasi	Perbaikan Plat Tugu yang Hilang	APBD

Tabel 3. 3 Cagar atau Warisan Budaya yang sudah ditetapkan

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Nomor Register	Surat Keputusan Wali Kota
1	Monumen Sejarah Perjuangan Kali Bekasi	Kec. Bekasi Selatan	monumen		431/Kep.255-Perbudpar/VI/2011
2	Tugu Pahlawan Bekasi	Jl. Veteran	Tugu		431/Kep.255-Perbudpar/VI/2011
3	Gedung Papak	Jl. Ir.H. Juanda	Gedung		431/Kep.255-Perbudpar/VI/2011
4	Tugu Agus Salim	Kec. Bekasi timur	Tugu		431/Kep.255-Perbudpar/VI/2011
5	Sumur Binong	Kec. Jatiasih	Sumur		431/Kep.255-Perbudpar/VI/2011
6	Sumur Batu	Kec. Bantargebang	Sumur		431/Kep.255-Perbudpar/VI/2011
7	Sumur Bandung	Kec. Jatisampurna	Sumur		431/Kep.255-Perbudpar/VI/2011
8	Rumah Adat Kisah	Kec. Jatisampurna	Rumah		431/Kep.255-Perbudpar/VI/2011
9	Klenteng Hok Lay Kiong	Kec. Bekasi Timur	Bangunan		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
10	Makam muhidin Tuhagus syeh	Kec. Jatiasih	Makam		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
11	Makam Ratu Mayang Sari	Kec. Jatiasih	Makam		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
12	Makam Ringin	Kec. Jatiasih	makam		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
13	Makam Kyai Kandong	Kec. Jatiasih	Makam		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
14	Makam Bambu Kuning	Kec. Rawalumbu	Makam		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
15	Mesjid dan Makam Keramat Syeh Muhammad Suhaemi	Kec. Bekasi Utara	Bangunan		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
16	Rumah Adat Imah Panggung	Kec. Jatisampurna	Rumah Adat		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
17	Makam Mbah Raden	Kec. Jatisampurna	Makam		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
18	Sumur Keramat Lebak	Kec. Mustikajaya	Sumur		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
19	Makam Kramat Uyt	Kec. Mustikajaya	Makam		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
20	Makam Uyt Jawa dan Kitan Kuno	Kec. Mustikajaya	Makam		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
21	Tugu Tapal Batas	Kec. Mustikajaya	Tugu		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
22	Makam Wa Ecok	Kec. Medan Satria	Makam		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
23	Makam Kramat Pangeran Mangkubumi	Kec. Medan Satria	Makam		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
24	Makam Benda	Kec. Jatiasih	Makam		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
25	Masjid Tua Nurul Huda	Kec. Pondok Gede	Bangunan		430/Kep.321-Disparbud/III/2018

26	Tugu Revolusi	Kec. Bekasi Selatan	Tugu		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
27	Rumah Adat Olot Kisan	Kec. Jatiasampurna	Rumah Adat		430/Kep.321-Disparbud/III/2018
28	Benda Suiker Molen	Kec. Bekasi Utara	Benda Bersejarah		400/6.2/KRP.463/Disparbud/I/X/2024
29	Makam Hasibuan	Kec. Bekasi Selatan	Makam		400/6.2/KRP.463/Disparbud/I/X/2024

Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian indikator **Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan** didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. **Perencanaan program yang tepat sasaran**, dengan penetapan target dan kegiatan pelestarian yang disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
2. **Komitmen dan koordinasi lintas pemangku kepentingan**, baik internal perangkat daerah maupun dengan pihak terkait, sehingga proses pelestarian dan penetapan cagar budaya dapat berjalan efektif.
3. **Optimalisasi pelaksanaan kegiatan**, khususnya dalam pelestarian **5 cagar budaya** dan penetapan **29 cagar budaya**, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian indikator.
4. **Pengelolaan anggaran yang efisien**, tercermin dari adanya efisiensi anggaran sebesar **2,23%**, tanpa mengurangi kualitas dan output kegiatan.
5. **Dukungan kebijakan dan regulasi**, yang memberikan kepastian hukum dalam proses penetapan dan pelestarian cagar budaya.

Gambar 3. 2 Meningkatnya daya saing sektor pariwisata PAD Sektor Pariwisata



Pada tahun 2025, capaian **Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata** mencapai **82,65%** dari target yang ditetapkan. Target PAD tahun 2025 sebesar **Rp 642.306.825.000**, dengan realisasi sebesar **Rp 530.888.352.995**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja PAD sektor pariwisata **belum sepenuhnya memenuhi target**, namun realisasi yang dicapai tetapi menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Realisasi PAD tersebut bersumber dari:

- Pajak Hotel sebesar Rp35.510.385.377
- Pajak Restoran sebesar Rp449.395.801.239
- Pajak Hiburan sebesar Rp45.982.166.379

Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2025, dilaksanakan kegiatan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha Jasa Kepariwisata sebagai upaya mendukung peningkatan indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.



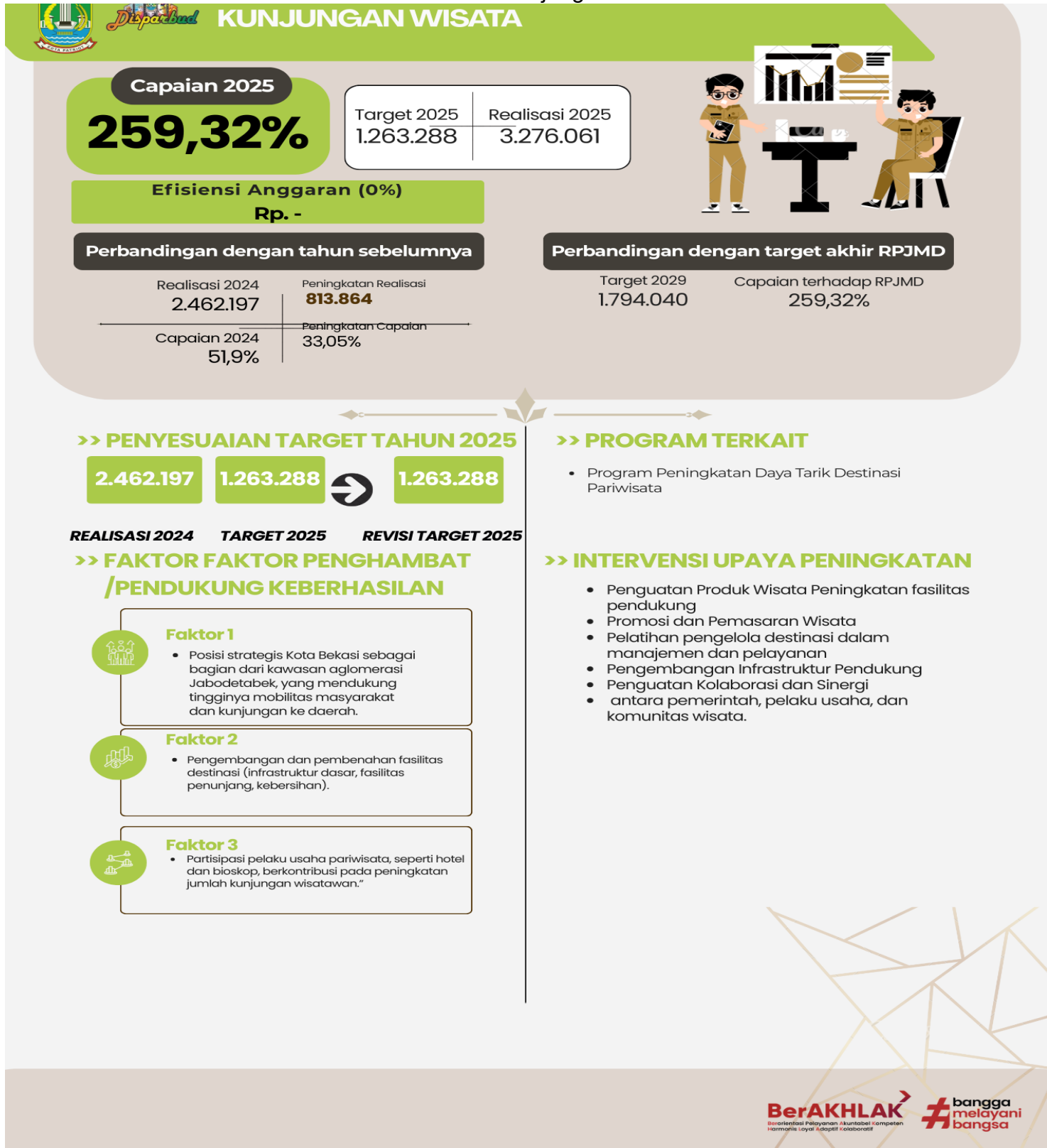
Gambar 3. 3 Pembinaan dan Pengawasan pelaku usaha jasa kepariwisataan

Dikarenakan indikator tersebut baru adanya pada Renstra 2025-2029, Baseline PAD sektor pariwisata tahun 2024 tercatat sebesar **Rp 518.484.041.877**, meskipun data peningkatan capaian belum tersedia. Sementara itu, perbandingan dengan rata-rata nasional belum dapat dilakukan karena keterbatasan data pembanding. Capaian ini menjadi dasar evaluasi untuk penguatan strategi peningkatan PAD sektor pariwisata pada periode selanjutnya, khususnya melalui optimalisasi potensi pariwisata daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan destinasi

Belum tercapainya target **PAD Sektor Pariwisata** tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, **belum optimalnya pemulihan dan peningkatan kunjungan wisata**, khususnya pada destinasi unggulan, sehingga berdampak pada penerimaan dari retribusi dan jasa kepariwisataan. Kedua, **keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pariwisata** di beberapa lokasi wisata turut memengaruhi daya tarik dan lama tinggal wisatawan.

Selain itu, **optimalisasi potensi PAD dari sektor pariwisata belum sepenuhnya maksimal**, terutama dalam pemanfaatan objek wisata baru dan peningkatan kepatuhan terhadap mekanisme pemungutan retribusi. Faktor lain yang memengaruhi adalah **kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat**, yang berdampak pada tingkat konsumsi dan belanja wisata. Kondisi tersebut secara keseluruhan berkontribusi terhadap capaian PAD sektor pariwisata yang baru mencapai **82,65%** dari target yang ditetapkan.

Gambar 3. 4 Kunjungan Wisata



Pada tahun 2025, indikator **Kunjungan Wisata** mencatat capaian sebesar **259,32%**, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar **1.263.288 kunjungan**, dengan realisasi mencapai **3.276.061 kunjungan**. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi serta keberhasilan strategi peningkatan daya tarik dan promosi destinasi wisata daerah.

Berdasarkan perbandingan dengan tahun sebelumnya, realisasi kunjungan wisata tahun 2024 tercatat sebesar **2.462.197 kunjungan**, meskipun data peningkatan capaian belum tersedia. Sementara itu, capaian tahun 2025 telah melampaui **target akhir RENSTRA sebesar 163.288**, dengan tingkat capaian terhadap RENSTRA mencapai **167,85%**. Data pembandingan dengan rata-rata nasional belum tersedia, sehingga capaian ini menjadi dasar evaluasi dan perencanaan peningkatan kinerja kunjungan wisata pada periode selanjutnya.

Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator **Kunjungan Wisata** tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya daya tarik destinasi wisata daerah, dukungan kegiatan promosi dan event kepariwisataan, serta perbaikan akses dan fasilitas pendukung di sejumlah objek wisata seperti pada program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Tahun 2025 memfasilitasi sarana prasarana di Folder Air Ciketing Udik.



Gambar 3. 5 Sarana dan Prasarana Kawasan objek wisata folder air Ciketing Udik

Dampak terhadap PAD

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada periode pelaporan menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, kondisi tersebut belum berbanding lurus dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yang masih berada di bawah target. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kunjungan berasal dari destinasi non-retribusi serta adanya kebijakan stimulus dan fasilitasi

event yang lebih berorientasi pada peningkatan daya tarik wisata dibandingkan optimalisasi pendapatan langsung. Namun demikian, peningkatan kunjungan tersebut tetap memberikan dampak positif terhadap perputaran

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kondisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya konversi belanja wisatawan

Peningkatan jumlah pengunjung belum diikuti dengan peningkatan pengeluaran yang signifikan. Hal ini terlihat dari karakteristik wisatawan yang didominasi oleh wisatawan harian (one-day trip) dengan pola konsumsi yang cenderung terbatas. Dengan lama tinggal yang singkat dan preferensi belanja yang relatif rendah, kontribusi terhadap pajak dan retribusi daerah menjadi kurang optimal.

2. Dominasi aktivitas pada sektor informal

Aktivitas ekonomi di sekitar destinasi wisata masih banyak berlangsung di sektor informal, seperti homestay tanpa izin, pedagang kaki lima, dan jasa transportasi tidak resmi. Meskipun perputaran ekonomi tetap terjadi, sebagian besar belum tercatat dalam sistem perpajakan dan retribusi daerah, sehingga belum memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

3. Belum optimalnya sistem pemungutan dan pengawasan

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala pada aspek pengawasan dan pelaporan, khususnya di daya tarik wisata (DTW). Pelaporan omzet usaha yang belum sepenuhnya akurat serta sistem pemungutan yang belum terintegrasi secara digital membuka ruang terjadinya kebocoran penerimaan.

4. Struktur tarif dan kebijakan yang kurang adaptif

Tarif retribusi dan pajak yang berlaku saat ini relatif belum mencerminkan nilai ekonomi aktual di lapangan. Di sisi lain, kebijakan insentif atau pembebasan retribusi pada periode tertentu—meskipun bertujuan untuk mendorong kunjungan—secara tidak langsung turut menekan capaian PAD.

5. Konsentrasi kunjungan pada destinasi non-retribusi

Lonjakan kunjungan sebagian besar terjadi pada destinasi wisata alam atau ruang publik yang tidak memungut tiket masuk. Termasuk di dalamnya destinasi yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Tingginya jumlah pengunjung pada lokasi tersebut belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD.

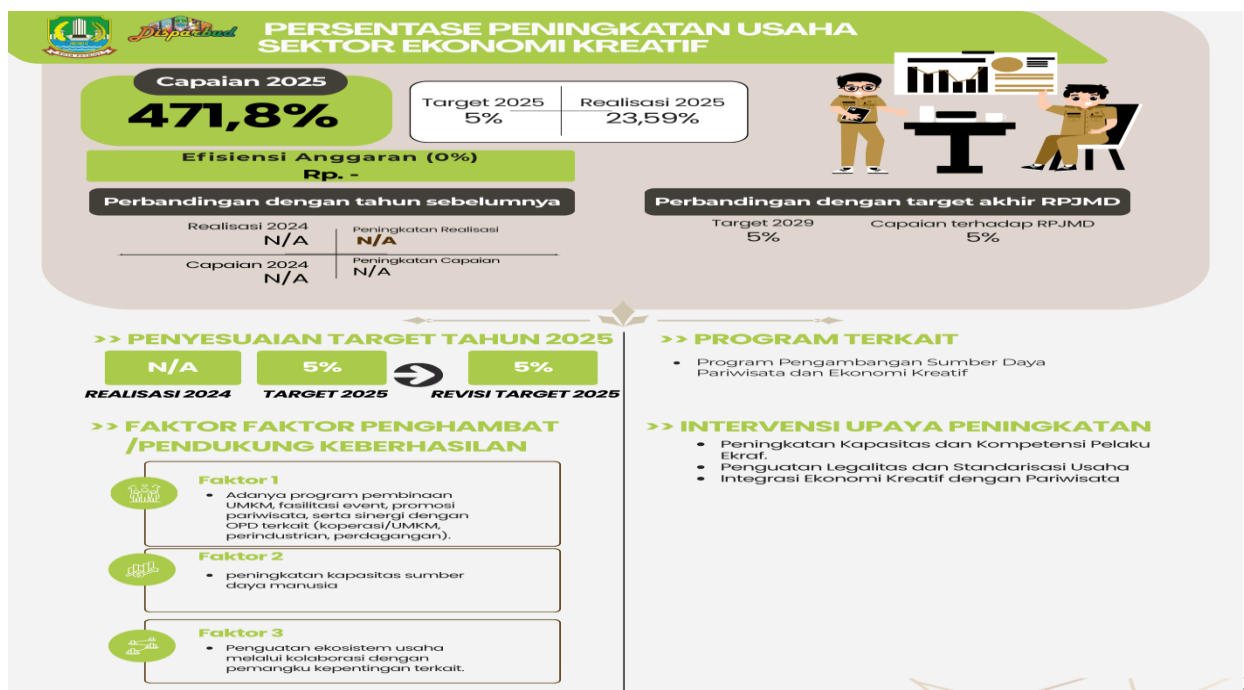
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingginya angka kunjungan wisatawan belum secara otomatis berdampak pada peningkatan PAD. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi pariwisata, baik dari sisi sistem pemungutan, struktur usaha, maupun pengembangan produk wisata. Dengan kata lain, tantangan utama tidak lagi pada menarik wisatawan, melainkan pada bagaimana mengelola kunjungan tersebut agar memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Mengoptimalkan sistem pemungutan PAD melalui penerapan digitalisasi, seperti e-ticketing, tapping box, dan integrasi data antar sektor, disertai penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Mendorong penataan dan formalisasi pelaku usaha pariwisata, khususnya sektor informal, melalui pendataan, kemudahan perizinan, serta penyederhanaan skema pajak.
3. Melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif retribusi agar lebih relevan dengan kondisi pasar, termasuk penerapan tarif diferensiasi secara selektif.
4. Mengembangkan produk dan atraksi wisata yang memiliki nilai tambah, seperti event tematik, paket wisata, serta penguatan subsektor ekonomi kreatif.
5. Mengarahkan strategi promosi tidak hanya pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas wisatawan dan lama tinggal.
6. Mengoptimalkan pengelolaan destinasi, termasuk menggali sumber pendapatan alternatif pada destinasi yang selama ini belum berkontribusi langsung terhadap PAD.
7. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia serta meningkatkan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan pariwisata dan pendapatan daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ke depan peningkatan kunjungan wisatawan dapat diimbangi dengan peningkatan kontribusi nyata terhadap PAD, sehingga sektor pariwisata benar-benar menjadi pengungkit pembangunan daerah.ekonomi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata secara umum.

Gambar 3. 6 Sasaran 3 Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif
Persentase Peningkatan usaha Sektor Ekonomi Kreatif



Pada Tahun 2025, realisasi kinerja telah melampaui target sebesar 23,59% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 5%. Maka dari itu indikator *Persentase Peningkatan Usaha Sektor Ekonomi Kreatif* menunjukkan capaian kinerja sebesar 471,8% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berjalan sangat efektif.

Capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain pembinaan dan pendampingan pelaku usaha ekonomi kreatif Dalam Program



Gambar 3. 7 Pembinaan Pelaku sektor Ekonomi Kreatif

Upaya pendampingan yang dilakukan memiliki dampak yang positif yaitu, adanya peningkatan Jumlah usaha sektor kreatif dari yang di tahun sebelumnya hanya berjumlah 1776, di tahun 2025 meningkat sebanyak 2195. Sehingga dapat di rumuskan

$$\text{Persentase peningkatan} = \frac{2195 - 1776}{1776} \times 100\% = 23,59\%$$

Penghitungan tersebut juga membuktikan Intervensi yang dilakukan mampu mendorong pertumbuhan jumlah usaha ekonomi kreatif secara signifikan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 5% per tahun, maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2029 telah mencapai

sekitar 94,36% dari target akhir RENSTRA. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja berada pada jalur yang positif, namun tetap memerlukan upaya lanjutan dan akselerasi program agar target RENSTRA dapat tercapai secara optimal.

Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya belum dapat dilakukan karena keterbatasan data realisasi pada tahun dasar. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya transisi RPD ke RPJMD maka terdapat perubahan IKU. Demikian pula, perbandingan dengan rata-rata nasional belum tersedia mengingat indikator persentase peningkatan usaha sektor ekonomi kreatif belum menjadi indikator yang distandarkan secara nasional.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan kinerja yang sangat baik, sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat keberlanjutan program pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas usaha, serta penyempurnaan sistem pendataan guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran di tahun-tahun berikutnya.

3.2 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi turut ambil peran dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan peningkatan pelayanan dan tata kelola urusan pariwisata dan urusan kebudayaan.

a. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data existing pegawai per tanggal 31 Desember 2025, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan didukung oleh 53 orang Pegawai, yang terdiri dari 23 orang ASN dan 30 Non ASN, yang melayani 3893 sektor usaha jasa pariwisata yang terdaftar serta 1713 pelaku usaha ekonomi kreatif dan 100 sanggar aktif belum termasuk jumlah pelaku seni dan budaya di 12 wilayah kecamatan maka terdapat keterbatasan SDM yang sangat tinggi. Sehingga sangat riskan terjadi kurang maksimal nya penyediaan layanan terhadap stake holder di bidang pariwisata dan kebudayaan.

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal. Efisiensi bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang menggunakan anggaran secara strategis untuk menciptakan dampak yang maksimal. Dalam rangka mencapai target sasaran di Tahun 2025, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, melaksanakan 7 program, 17 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 15.856.147.725,00 dengan sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dari dana DBCHT Rp. 266.835.000 dari pagu murni sebesar Rp. 16.057.097.160 atau terdapat pengurangan pagu sebesar 200.949.435.

Berdasarkan data realisasi keuangan sampai dengan 30 Desember 2025, terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 13.582.402.957 atau sebesar 85,66% dari total anggaran. Dengan efisiensi sebesar 3,91% atau sebesar Rp. 1.15.427.984.165,-.

3.4 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi didukung oleh 7 Program, 18 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri dari 4 Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - 3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 6) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 7) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 4) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pemasaran Pariwisata
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peingkat Kabupaten/Kota
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3. 4 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	10.413.214.120	100	85,51%
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	40.000.000	100	84,93%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	8.211.938.000	100	83,28%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	195.561.900	100	96,83%
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100	193.536.500	100	91,75%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	103.190.000	100	77,42%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.668.987.720	100	95,03
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	658.909.500	100	63,18%

II	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100	1.670.339.605	100	86,23%
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	100	942.670.250	100	86,74
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	100	350.000.000	100	91,86
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	100	350.000.000	100	91,86
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	100	221.135.625	100	85,25
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	100	156.533.730	100	72,00
III	Program Pemasaran Pariwisata	100	1.139.499.000	100	83,85
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100	1.39.499.000	100	83,85
IV	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100	598.845.000	100	94,68
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	100	589.845.000	100	94,68

	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
V	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	100	481.030.500	100	95,71
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	89.093.000	100	83,61
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	391.937.500	100	98,46
VI	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100	625.310.000	100	99,34
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	625.310.000	100	99,34

Sumber : Sub.Bagian Keuangan

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa terdapat efisiensi pada semua program dan kegiatan dengan total efisiensi sebesar 3,91%.

Adapun keterkaitan antara tingkat efisiensi terhadap capaian target indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah	28 Dokumen	28 Dokumen
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12 laporan	12 laporan
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalas	19 jenis	19 jenis

4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yg dicetak dan Digandakan	20614 lembar	20614 lembar
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang Undangan	Jenis dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	60 jenis	60 jenis
6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan rapat konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan
7	Pengelolaan Surat menyurat dan Naskah Dinas Lainnya	Jumlah surat masuk surat keluar dan naskah dinas lainnya	1800 dokumen	1800 dokumen
8	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan	36 laporan	36 laporan
9	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar, jumlah SDM Non ASN dan jenis administrasi keuangan	12 laporan	12 laporan
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 unit	7 unit
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2 unit
12	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen capaian dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	6 dokumen	6 dokumen
13	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan	4 dokumen	4 dokumen
14	Pelaksanaan administrasi kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang terlayani	12 laporan	12 laporan
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik Kantor	6 paket	6 paket
16	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	864 orang	864 orang
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	40 unit	40 unit

18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan
----	---------------------------	---------------------------------	------------	------------

Tabel 3. 6 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terlaksananya program peningkatan daya tarik destinasi wisata	Jumlah kawasan yang ditata	1 lokasi	1 lokasi
2	Terlaksananya penyelenggaraan penunjang urusan bidang pariwisata	Tersusunnya hasil perumusan kebijakan teknis urusan	1 dokumen	1 dokumen
		Pelaksanaan Kepariwisata		
		Jumlah laporan hasil pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata	1 laporan	1 laporan
		Jumlah laporan hasil pembeinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata	12 laporan	12 laporan
		Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat pariwisata	1 laporan	1 laporan

Tabel 3. 7 Program Pemasaran Kepariwisata

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terlaksananya program pemasaran kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	951.286 orang	2.490.665 orang
2	Terlaksananya penunjang kegiatan pemasaran kepariwisataan	Promosi kepariwisataan	12 laporan	12 laporan
		Analisis Data Kepariwisata dan Informasi Kepariwisata	12 laporan	19 jenis
		Kerjasama dan kemitraan Kepariwisata	12 laporan	12 laporan

Tabel 3. 8 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	45 orang	45 orang
		Jumlah sanggar budaya yang dikembangkan	5 lembaga	5 lembaga
2	Penetapan cagar budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	6 situs	6 situs
	Standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standardisasi	25 sertifikat	25 sertifikat
	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah Lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga	5 lembaga
	Menyusun laporan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan kesenian tradisional	Jumlah cagar budaya dan kesenian tradisional yang dikembangkan dan pembinaan	12 laporan	12 laporan

3.5 Realisasi Anggaran

Berikut ini disajikan informasi komposisi realisasi anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.413.214.120	8.904.462.579	85,51

	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	40.000.000	32.453.800	81,13
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.211.938.000	6.839.185.804	83,28
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.561.900	189.363.800	96,83
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	278.000.000	225.650.227	81,17
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	193.536.500	177.579.065	91,75
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.190.000	79.885.002	77,42
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.668.987.720	1.585.995.108	95,03
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.909.500	416.313.986	63,18
II	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.670.339.605	1.440.393.989	86,23
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	942.670.250	817.641.189	86,74
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	350.000.000	321.512.900	91,86
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	221.135.625	188.528.400	85,25
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	156.533.730	112.711.500	72,00
III	Program Pemasaran Pariwisata	1.139.499.000	955.499.066	83,85
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.139.499.000	955.499.066	83,85
IV	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	589.845.000	558.471.242	94,68
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	589.845.000	558.471.242	94,68
V	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	481.030.500	460.401.787	95,71
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	89.093.000	74.492.750	83,61

	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	391.937.500	385.909.037	98,46
VI	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	625.310.000	621.210.081	99,34
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	625.310.000	621.210.081	99,34

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis serta 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU ada yang masih belum tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini Renstra Tahun 2025-2029), maka terlihat bahwa pada tahun 2025 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan tercapai. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam Renja tahun 2025 sudah sesuai target yang ditetapkan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisa ketercapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025, terdapat beberapa hal-hal yang masih perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya diantaranya :

- 1) Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan melalui pengendalian dan evaluasi internal.
- 2) Meningkatkan sinergitas Program dan kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dengan instansi terkait serta stakeholder agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkandari Wali Kota kepada Kepala Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;

- 3) Meningkatkan promosi seni budaya dan pariwisata daerah didalam media film dan media online;
- 4) Meningkatkan peran pelaku ekonomi kreatif dalam mendukung peningkatan PAD;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan pelaku seni tradisional Bekasi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat Kota Bekasi.yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;

Melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran pada semua pihak yang membutuhkan informasi kinerja serta dapat memberikan motivasi khususnya bagi bidang-bidang dilingkungan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai program maupun kegiatan pada masa yang akan datang.



Bekasi, 31 Januari 2026
Kepala Dinas Pariwisata
dan kebudayaan Kota Bekasi

Dzikron, S.T., M.T.
NIP. 197308022002121006